

**PROFIL NARAPIDANA BERDASARKAN HIERARKI KEBUTUHAN**

**ABRAHAM MASLOW**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh**

**Derajat Sarjana S-1 Psikologi**



Diajukan oleh :

Yunita Kirana Putri Permatasari

F 100.060.051

**FAKULTAS PSIKOLOGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sepanjang hidupnya tidak akan terlepas dari berbagai kebutuhan. Berbagai kebutuhan dasar yang meliputi kehidupan manusia senantiasa menuntut untuk dipenuhi sehingga mendorong manusia untuk bertindak laku memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup. Tingkah laku itu sendiri merupakan satu kesatuan perbuatan yang berarti. Tujuan atau obyek dari kebutuhan menonjolkan arti yang sebenarnya dari tingkah laku manusia, khususnya untuk berbuat, berperilaku, atau berusaha. Dapat dikatakan bahwa setiap tingkah laku manusia merupakan manifestasi dari berbagai macam kebutuhan dasar seseorang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kebutuhan dasar manusia memegang peranan penting dalam hidup manusia. Kebutuhan adalah substansi sekuler (menyangkut hal-hal nonreligius), motif fisiologis dan psikologis yang harus dipenuhi atau dipuaskan oleh organisme atau manusia supaya mereka bisa sehat sejahtera dan mampu melakukan fungsinya (Chaplin, 2006). Maka untuk kelancaran hidup manusia, kebutuhan dasar yang muncul harus mendapatkan pemuasan atau harus dicukupi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak boleh senantiasa dihalangi karena bisa menimbulkan frustrasi. Jika seseorang terus menerus mengalami frustrasi ia akan diliputi oleh stress, ketegangan dan ketakutan, sampai mengalami mental breakdown atau kepatahan mental (Kartono, 2000).

Kebutuhan dasar manusia bersifat subjektif maksudnya kebutuhan dasar antara manusia satu dengan manusia yang lainnya tidaklah sama, begitu juga dengan cara manusia itu memenuhi kebutuhannya. Masing-masing manusia memiliki beragam cara yang bisa ditempuh untuk memenuhi setiap kebutuhannya, tergantung dari kondisi lingkungan sekitar, keadaan sosial dalam masyarakat serta pengalaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemui bahwa setiap orang memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang berbeda-beda dan masing-masing memilih cara yang tidak selalu sama untuk mendapatkan apapun sesuai dengan keinginannya, ada orang yang memiliki cita-cita sangat tinggi, hidup mewah dan serba kecukupan, sedangkan ada juga yang puas hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, ada yang melakukan banyak cara demi kebahagiaan orang lain serta keluarganya atau hanya untuk kesenangan pribadinya saja.

Seseorang yang dilahirkan dan hidup di tengah-tengah lingkungan yang memberi banyak kesempatan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka bisa dikatakan cukup beruntung, karena seseorang akan memiliki karakter yang begitu kuat serta menyatu sehingga mampu tetap tegak menghadapi kehilangan atau penundaan pemuasan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maslow, “Orang yang selama bertahun-tahun awalnya telah tumbuh aman dan kuat, cenderung akan terus aman dan kuat menghadapi segala bentuk ancaman” (Goble, 1994).

Akan tetapi, kenyataannya tidak semua manusia hidup dalam lingkungan yang serba menguntungkan, bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam kondisi lingkungan kekurangan, baik secara materi, sosial maupun

spiritual. Menurut SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2009 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan saja sudah tercatat sebesar 32,53 juta atau sekitar 14,15 persen. Kondisi perekonomian yang sarat kekurangan tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sulit terpenuhi dan seringkali disikapi dengan hal negatif oleh sebagian orang, sehingga mendorong munculnya perilaku-perilaku anti sosial di masyarakat yang dapat mengancam keamanan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Maslow dalam Goble, 1994 bahwa orang-orang yang terpuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya ternyata lebih sehat, lebih bahagia serta lebih efektif, sedangkan orang yang kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak terpuaskan menunjukkan gejala-gejala psikopatologis

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa frustrasi akan kebutuhan-kebutuhan dasar akan melahirkan gejala-gejala psikopatologis yang bisa mewujud dalam sebuah tindakan antisosial. Terlebih dalam kondisi globalisasi seperti sekarang ini, kehidupan masyarakat yang semakin kompleks mengakibatkan munculnya berbagai macam kebutuhan hidup. Manusia semakin tidak puas dengan apa yang dimilikinya sehingga selalu merasa dirinya belum terpuaskan kebutuhan dasarnya secara menyeluruh. Maka, tidak jarang manusia terjerat kasus-kasus tindak pidana karena dorongan kuat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berbagai latar belakang permasalahan kehidupan manusia tentang pemenuhan kebutuhan seolah menggiring manusia untuk melakukan tindakan yang seringkali melenceng dari norma dan tatanan hidup bermasyarakat sehingga terpaksa harus berurusan dengan hukum. Maraknya kasus penyuapan yang dilakukan oleh para pejabat akhir-akhir ini merupakan bentuk nyata upaya pemuasan kebutuhan

akan penghargaan yang keliru sehingga malah menghancurkan harga dirinya sendiri. Kasus munculnya aliran sesat dan terorisme yang memakan banyak korban belum lama ini juga merupakan sebuah tindakan kurang tepat dalam memenuhi kebutuhan tertinggi manusia yaitu aktualisasi diri. Masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi sehari-hari dan semuanya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud dan demi mencapai kepuasan yang diinginkan.

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum maka seluruh tatanan kehidupan seyogyanya berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Ketika suatu tindak kejahatan sudah terlanjur dilakukan maka hukumlah yang seharusnya bertindak apapun alasannya dan siapapun pelakunya hukum harus tetap dijalankan. Bonger (1992) menyatakan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial harus memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan yaitu hukuman atau tindakan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan untuk diberikan hukuman disebut dengan narapidana (Hayatun, dalam Puspita, 2008).

Pemberian hukuman terhadap para narapidana dilakukan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang bisa disebut dengan LP. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku sejak 27 April 1964, LP diharapkan mampu menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain: merupakan komunitas yang teratur dengan baik, kondisinya tidak menambah kesulitan bagi para narapidana, dan aktivitas di dalamnya sebanyak mungkin membantu narapidana untuk mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana.

Kenyataan menunjukkan bahwa LP belum sepenuhnya mampu menunjukkan fungsi yang ideal. Berdasarkan Direktorat Registrasi dan Statistik

Direktoral Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terjadi over kapasitas di dalam LP di Indonesia sejumlah 49.036 orang. Hal seperti ini tentulah sangat beresiko, narapidana bisa jadi semakin kesulitan dalam menjalani masa hukumannya. Praktisnya, hal ini berdampak pada buruknya kesehatan narapidana yang merupakan kebutuhan vital untuk bisa mengikuti proses pembinaan di LP dengan optimal.

Sebuah artikel di internet juga menuliskan adanya kritikan tajam terhadap LP di Indonesia saat ini terkait dengan pembinaan yang dilaksanakan kepada pelaku kejahatan. Pembinaan dianggap tidak berjalan, muncul pada kasus-kasus narapidana narkoba, penipuan, bahkan teroris, yang kembali melakukan tindak pidana lanjutan (Simon, 2009).

Lembaga pemasyarakatan seharusnya memberlakukan serangkaian kegiatan khusus bagi para narapidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai sistem pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

*Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*

Dalam pasal di atas jelas disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya baik secara kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

Namun, seringkali kondisi lingkungan yang serba terbatas di dalam lembaga pemasyarakatan membuat kebutuhan masing-masing narapidana tidak dapat

terpenuhi. Proses pembinaan yang diberikan terhadap narapidana seringkali disamaratakan padahal jelas sekali bahwa narapidana memiliki latar belakang permasalahan kebutuhan yang berbeda-beda. Seharusnya pembinaan diberikan kepada narapidana sesuai dengan kebutuhannya sehingga benar-benar bermanfaat dan dapat menunjang proses hidup bermasyarakat yang seharusnya setelah ia bebas nantinya. Pemetaan pembinaan yang tepat di dalam LP atau sesuai dengan kebutuhan narapidana akan memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan bermasyarakat yang akan dijalannya nanti setelah keluar dari LP sehingga ia tidak akan kembali menjadi seorang narapidana lagi.

Ancok (Helmi, 1997) mengemukakan bahwa perlakuan yang serba khusus pada narapidana membuat terjadinya perbedaan kehidupan yang mencolok antara kehidupan yang ada di luar dan di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama dalam hal kebebasan hidup sehari-hari.

Keterampasan kebebasan di dalam LP membuat narapidana merasa terisolasi dari masyarakat dan mengalami depresi. Hal tersebut sama sekali bukanlah hal yang diinginkan semua orang dan memang sesuatu yang harus dijalani dengan perjuangan besar. Belum lagi perubahan status sosial secara drastis yang berpengaruh pada kebutuhan akan penghargaan, persepsi masyarakat yang negatif yang dapat mengancam harga dirinya, kesepian, keterbatasan beraktifitas yang membatasi kebebasannya serta minimnya dukungan sanak saudara akan berdampak pada terganggunya kondisi prasyarat pemenuhan kebutuhan dasar. Padahal mengutip kata-kata Maslow (1954), "Kondisi prasyarat pemenuhan kebutuhan dasar seharusnya dipertahankan, sebab tanpa kondisi tersebut aneka kebutuhan dasar mustahil didapat atau setidaknya menjadi sangat terancam". Kondisi prasyarat itu meliputi

kemerdekaan untuk berbicara, kemerdekaan untuk melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang tidak merugikan orang lain, kebebasan untuk menyelidiki, kemerdekaan untuk mempertahankan atau membela diri, keadilan, kejujuran, kewajaran dan ketertiban (Goble, 1996).

Kondisi seperti di atas sangat dirasakan oleh para narapidana terutama ketika menjalani awal masa hukuman di dalam LP. Seorang narapidana akan memaksakan diri untuk tetap bisa bertahan hidup dengan berusaha beradaptasi terhadap lingkungan barunya, mencari cara untuk memenuhi setiap kebutuhan dasarnya dalam kondisi penuh keterbatasan. Lambat laun narapidana akan semakin terbiasa dengan kondisi tersebut dan akan memenuhi kebutuhannya secara bertahap mulai dari kebutuhan dasarnya yang paling bawah hingga ke kebutuhan yang lebih tinggi yaitu mengenai pengembangan diri.

Menurut Maslow (1954), manusia akan senantiasa memenuhi kebutuhan dasarnya secara berjenjang mulai dari kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki dan cinta, kebutuhan akan penghargaan, hingga kebutuhan akan aktualisasi diri. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya kalau jenjang sebelumnya relatif terpuaskan. Kelima jenjang kebutuhan dasar manusia ini dikenal dengan Hierarki Kebutuhan Maslow (Goble, 1994).

Namun, tidak semua manusia memenuhi kebutuhannya utuh berurutan secara berjenjang. Kebutuhan akan cinta dan kepemilikan pada seorang narapidana bisa saja muncul sementara kebutuhan rasa amannya belum sepenuhnya terpuaskan. Menurut Goble (1994), kejadian seperti ini sudah dijelaskan oleh Maslow dalam bukunya *Motivation and Personality* pada tahun 1954, bahwa Maslow



memperingatkan agar hierarki kebutuhan dasar tersebut jangan dipandang secara kaku. Maslow menyatakan bahwa tidak ada jaminan kebutuhan akan rasa aman tidak akan muncul sebelum kebutuhan akan makanan terpuaskan sepenuhnya, atau bahwa kebutuhan akan cinta akan muncul sebelum kebutuhan rasa aman terpenuhi. Kebanyakan masyarakat telah mampu memuaskan sebagian besar kebutuhan-kebutuhan dasar mereka meski belum secara penuh, dan masih ada kebutuhan dasar yang belum terpuaskan sama sekali. Kebutuhan dasar yang sama sekali belum terpuaskan itulah yang memiliki pengaruh besar pada tingkah laku.

Serangkaian kondisi di atas berangsur-angsur akan membentuk profil seorang narapidana. Oleh karena kebutuhan seorang narapidana bersifat relatif maka profil narapidana yang terbentuk pun belum tentu sama. Selama ini kebutuhan narapidana seolah dipandang homogen sehingga pemberian pembinaan seringnya dipukul rata hanya dengan satu jenis rangkaian kegiatan saja. Padahal secara realistis kebutuhan narapidana jelas tidak sama maka sangatlah penting untuk mengetahui profil narapidana dan nantinya akan digunakan menentukan model pembinaan seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang narapidana. Sehingga kegiatan pembinaan di dalam LP benar-benar bermanfaat khususnya dalam menanggulangi tindak pidana lanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menarik untuk dibahas di sini adalah ” Bagaimanakah profil narapidana terkait dengan penentuan model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Untuk mengkaji hal tersebut, penulis mengambil judul “ Profil Narapidana berdasarkan Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow”.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami profil narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan teori “Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow” sehingga dapat disusun model pembinaan yang tepat bagi seorang narapidana.

### **C. Manfaat Penelitian**

Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi sosial.

Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi para narapidana sebagai bahan informasi tentang tingkatan kebutuhan dasar manusia.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan sebagai masukan dalam menyusun rangkaian kegiatan pembinaan yang efektif terhadap para narapidana untuk bisa menanggulangi tindak pidana lanjutan.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah kriminalitas agar dapat memanfaatkan informasi dan mempelajari bagaimanakah sesungguhnya variasi profil narapidana di lembaga pemasyarakatan pada penelitian ini, sehingga mampu menciptakan model pembinaan yang tepat bagi para narapidana serta sebagai bahan pelengkap dalam metode pendampingan dan pengarahan yang dilakukan terhadap narapidana dalam menjalani masa tahanan.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang narapidana, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, sehingga bisa melakukan penelitian serupa dengan populasi atau wilayah, pendekatan penelitian, serta instrument pengumpulan data yang lebih teliti.